

EFEKTIVITAS SISTEM DISTRIBUSI PUPUK DI KABUPATEN MALANG

Dwi Susilowati
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang
E-mail: susilowati@umm.ac.id

Abstract

The research purpose is to understand level and factor in the failure of fertilizer distribution system based on minister of industry and commerce instruction No. 70/MPP/Kep/2/2003. To determine the effectiveness of fertilizer distribution system, the author the ratio between the average expected targets and the reality. The results of this research is χ^2 about 0.500 with the values of χ^2 tables around 11.34, significant at the 0.001 level in the region of H_0 is received. The conclusion is effective distribution of fertilizers rely on the right circumstances, that consist of time, quantity, price, quality, location and type.

Keywords: *Fertilizer, distribution system, Malang*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat dan faktor dalam kegagalan penyaluran pupuk system based pada menteri industri dan perdagangan instruction No 70/MPP/Kep/2/2003. Untuk menentukan efektivitas sistem distribusi pupuk, penulis rasio antara target yang diharapkan rata-rata dan realitas. Hasil dari penelitian ini adalah χ^2 sekitar 0.500 dengan nilai-nilai χ^2 tabel sekitar 11.34, signifikan pada tingkat di wilayah H_0 0,001 diterima. Disimpulkan bahwa distribusi yang efektif dari pupuk bergantung pada situasi yang tepat, yang terdiri dari waktu, jumlah, harga, kualitas, lokasi dan jenis.

Kata kunci: *Pupuk, sistem distribusi, Malang*

Bagi para petani Indonesia terutama di Pulau Jawa, datangnya masa tanam pada beberapa tahun ini, bukan lagi pertanda datangnya suatu harapan yang perlu disambut dengan kegembiraan, tetapi justru pertanda ketidakpastian yang perlu disambut dengan rasa was-

was dan prihatin. Keprihatian ini terutama tertuju pada ketidakpastian tentang ketersediaan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan terutama pupuk.

Pupuk sebagai sarana produksi yang sangat dibutuhkan para petani

pada saat musim tanam selama beberapa tahun ini, justru cenderung sulit diperoleh di tingkat pengecer. Kalaupun masih tersedia, harganya sudah melonjak sangat tinggi bahkan sering mencapai di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp. 1.050 /Kg (Kompas, 17 Desember 2003). Hal ini terjadi akibat jumlahnya yang tersedia jauh di bawah kebutuhan petani.

Kondisi yang demikian jelas sangat merugikan bagi petani, karena akan menurunkan tingkat pendapatannya. Turunnya tingkat pendapatan petani ini terjadi karena 3 hal, yaitu akibat meningkatnya biaya produksi seiring dengan naiknya harga pupuk dan akibat turunnya hasil produksi (produktifitas lahan) akibat terlambatnya jadwal pemupukan serta turunnya harga produk pertanian dikala panen.

Kelangkaan pupuk pada saat musim tanam sebenarnya tidak perlu terjadi, bila produsen pupuk selalu mengutamakan kebutuhan dalam negeri dan distribusi pupuk berjalan dengan lancar sampai ke tingkat petani. Karena menurut Diirektur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Deperindag Zaenal Arifin (Dalam Kompas, 27 November 2003) jumlah total produksi pupuk dalam negeri yang mencapai 6 juta ton, masih berada di atas total kebutuhan pupuk dalam negeri yang hanya 4,4 juta ton saja. Atau ada kelebihan stock sebanyak 1,6 juta ton.

Namun sulit rasanya untuk mencegah tidak terjadi perdagangan pupuk ke luar negeri secara besar-besaran, terutama yang ilegal kalau melihat disparitas harga pupuk ekspor

dengan harga eceran resmi dalam negeri yang cukup tinggi, yaitu Rp. 400/kg. Disparitas harga yang cukup tinggi ini terjadi karena memang harga pupuk ekspor mencapai 170 dollar amerika per ton yang setara dengan 1.445.000/ ton atau Rp. 1.445/kg pada kurs Rp. 8.500, sedangkan harga eceran dalam negeri yang hanya Rp. 1.050/kg (kompas, 7 Pebruari 2003).

Rendahnya harga pupuk di dalam negeri ini tidak lain akibat pupuk tersebut mendapatkan subsidi pemerintah melalui produsen pupuk dalam bentuk bahan baku pupuk, yaitu berupa gas dengan harga yang lebih rendah. Besarnya subsidi pemerintah terhadap bahan baku pupuuk ini adalah sebesar \$ 1/MMBTU (Kompas, 11 Desember 2003).

Melihat kondisi perpupukan dalam negeri yang memberatkan petani dan mengancam ketersediaan beras nasional ini, mendorong pemerintah untuk menata kembali sistim distribusi pupuk. Penataan kembali sistim distribusi pupuk tersebut itu tertuang dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian no. 70/MPP/Kep/2/2003, yang kemudian diperbarui dengan surat keputusan No 306/MPP/Kep/4/2003 (Kompas, Kamis 27 November 2003).

Isi surat keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian no. 70/MPP/Kep/2/2003 antara lain tentang kewajiban setiap produsen pupuk untuk lebih mendahulukan pengadaan kebutuhan di dalam negeri dibandingkan ekspor dan bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari lini I sampai lini IV. Artinya setiap perusahaan dilarang melempar

kelebihan produksi ke pasar luar negeri bila kebutuhan di dalam negeri belum terpenuhi sampai di tingkat petani.

Disamping itu untuk menjamin kelancaran distribusi pupuk di dalam negeri, surat keputusan ini juga menentukan bahwa distribusi pupuk untuk dalam negeri tidak lagi ditangani oleh satu perusahaan induk seperti yang selama ini dilakukan yaitu oleh PT. Pupuk Sriwijaya, tetapi diserahkan kepada 5 produsen pupuk dengan tanggung jawab daerah distribusi masing-masing berdasarkan rayon. Lima produsen pupuk yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mendistribusikan pupuk dan daerah distribusinya adalah PT. Pupuk Iskandar Muda (PT. PIM): Aceh dan Sumatera Utara, PT. Pupuk Kujang: Jawa Barat, PT. Petro Kimia Gresik: Jawa Timur, PT. Pupuk Kalimantan Timur: kawasan Indonesia bagian timur, dan PT. Pupuk Sriwijaya: Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera selain Aceh dan Sumut.

Dengan adanya pembagian daerah distribusi ini, maka produsen pupuk tidak dapat lagi secara bebas memasarkan produknya di seluruh wilayah Indonesia kecuali daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Disamping itu, juga dilarang melakukan perdagangan pupuk yang mengakibatkan perpindahan pupuk antar rayon. Hal ini dilakukan untuk menjaga pangsa pasar bagi masing-masing produsen dan stock pupuk pada daerah distribusi.

Disamping itu setiap produsen harus mampu memenuhi kebutuhan daerah distribusi yang menjadi tanggung jawabnya. Bagi produsen yang mengalami kesulitan untuk memenuhi tanggung jawabnya bisa mengadakan kerja sama operasi

dengan produsen lainnya yang mempunyai kemampuan lebih, seperti yang dilakukan oleh PT. Petro Kimia Gresik dengan PT. Pusri dalam memenuhi kebutuhan Pupuk di Jawa Timur.

Harapan pemerintah dengan diperbaikinya sistem distribusi pupuk ini adalah petani bisa memperoleh pupuk dalam kondisi 6 tepat, yaitu tepat waktu, jumlah, harga, mutu, jenis dan tempat. Yang akibat selanjutnya dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja petani sekaligus dapat menjaga ketersediaan pangan nasional.

Ternyata harapan pemerintah dan petani tentang pupuk ini sampai awal tahun 2004 belum dapat terealisasi, karena kenyataannya pupuk masih saja sulit diperoleh pada tingkat petani atau walaupun dapat diperoleh tetapi dengan harga Rp. 1.300/kg. Suatu tingkat harga yang jauh dari ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Menperindag dan Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) bahkan mensinyalir langkanya pupuk di dalam negeri sejak tahun 2003 sampai awal tahun 2004 ini bukan akibat kekurangan stock; akibat berkurangnya suplai gas pada beberapa pabrik pupuk seperti PT. Petro Kimia dan PT. Pupuk Iskandar Muda, tetapi lebih disebabkan oleh merembesnya pupuk ke luar negeri oleh produsen pupuk tertentu (Kompas, 6 pebruari 2004). Hal ini didukung oleh data volume ekspor pupuk urea dan organik pada semester I tahun 2003 yang naik dibanding semester yang sama pada tahun 2002. Volume ekspor pupuk urea dan organik pada semester I tahun 2003 mencapai 584.924 ton dengan nilai 79,41 juta Dollar, sedangkan pada tahun 2002 semester yang sama hanya mencapai 571.366 ton dengan nilai

63,58 juta Dollar (Kompas, 28 November 2003).

Kondisi di atas ditambah dengan masih terjadinya perdagangan pupuk antar rayon daerah pemasaran, seperti mengalirnya 300.000 ton pupuk urea produksi PT. Pusri dari Jawa Tengah Ke Kediri (Kompas, 17 Desember 2003) menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan pemerintah yang baru tentang distribusi pupuk yang diatur oleh surat keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian no. 70/MPP/Kep/2/2003. Untuk itu, wajar kiranya bila dilakukan penelitian yang berupaya mengevaluasi sistim distribusi pupuk yang baru ini.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada daerah Kabupaten Malang, mengingat Kabupaten Malang merupakan salah satu lumbung beras bagi Jawa Timur selain Kabupaten Ngawi, Madiun, Lumajang dsb.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan akan terungkap masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan sistem distribusi yang baru dalam mencapai 6 situasi tepat pada pupuk. Lalu, hasil penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan guna memperbaiki sistem distribusi yang ada .

Mengingat penelitian ini berupaya untuk mengungkap efektivitas pelaksanaan sistem distribusi pupuk yang baru yang dilakukan berdasarkan surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 70/MPP/Kep/2/2003, dalam menjamin ketersediaan pupuk di tingkat petani dilihat dari 6 situasi tepat, yaitu tepat waktu, jumlah, harga, mutu, jenis dan tempat, maka

penelitian ini bertujuan: 1. Mengetahui efektivitas sistem distribusi pupuk yang dilakukan berdasarkan surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.70/MPP/Kep/2/2003 di Kabupaten Malang, dalam menjamin ketersediaan pupuk di tingkat petani dilihat dari 6 situasi tepat, yaitu tepat waktu, jumlah, harga, mutu, jenis dan tempat; 2. Mengetahui faktor apakah yang menghambat pelaksanaan sistem distribui pupuk berdasarkan surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.70/MPP/Kep/2/2003 di Kabupaten Malang; dan 3. Mengetahui kebijakan apakah yang perlu diambil oleh pemerintah Kabupaten Malang untuk menjamin ketersediaan pupuk di tingkat petani dalam 6 situasi tepat, yaitu tepat waktu, jumlah, harga, mutu, jenis dan tempat di masa yang akan datang.

Menurut Suidiyono (1989), salah satu pelaku ekonomi dalam suatu sistem perekonomian apapun, baik yang bersifat tradisional maupun modern, atau dalam sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis adalah pemerintah. Pelaku ekonomi yang lain adalah rumah tangga konsumsi atau yang sering disebut konsumen dan rumah tangga prtoduksi, yang sering disebut sebagai produsen.

Peran pemerintah dalam perekonomian tidak dapat dihindarkan, karena kekuatan yang tak terlihat (*invisible hand*) yang terdapat dalam mekanisme pasar yang selalu mengarahkan ekonomi selalu dalam suatu keseimbangan tidak bekerja dalam suatu perekonomian yang tidak terjadi persaingan sempurna dan terjadi eksternalitas (Samuelson, 1989). Yang dimaksud dengan persaingan sempurna

menurut Koutsoyanis (1985) adalah suatu keadaan pasar dimana terdapat banyak banyak produsen dan konsumen, sehingga tidak ada sebuah perusahaan, petani ataupun pekerja yang menguasai bagian yang cukup besar dari pasar, sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Persaingan sempurna ini diakui oleh para ahli ekonomi akan mengarahkan perekonomian untuk mengalokasikan input dan output secara efisien.

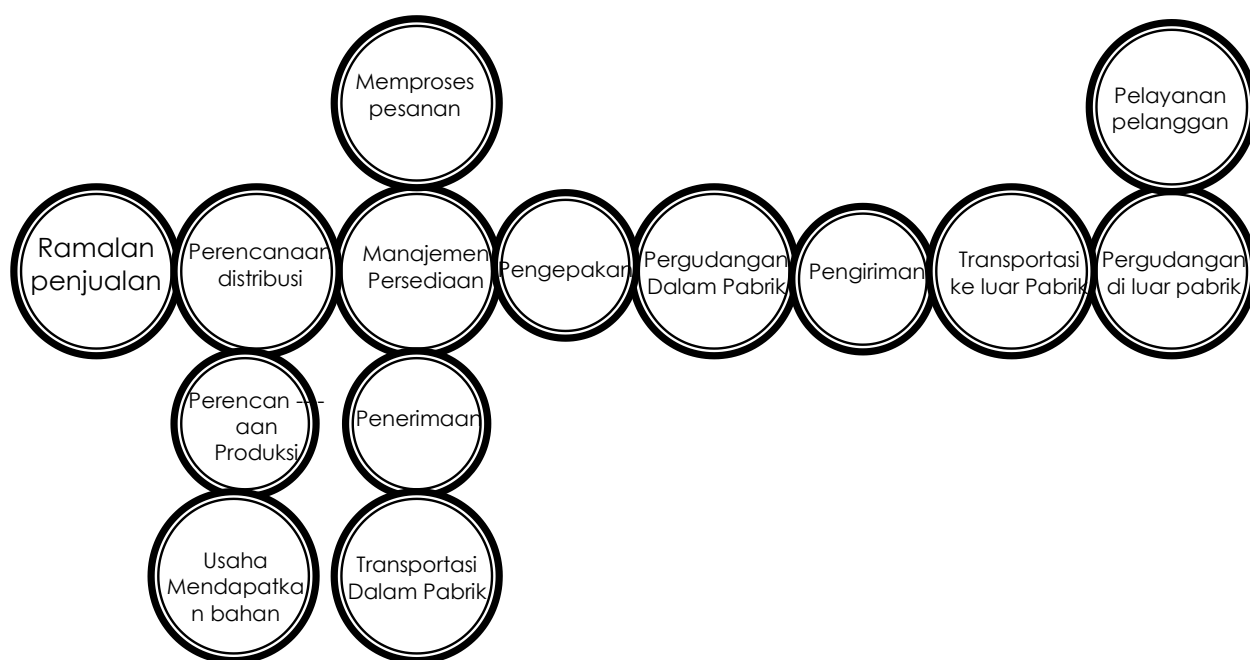
Suatu perekonomian dapat dikatakan efisien bila berada pada batas kemungkinan produksi. Tetapi, begitu persaingan tidak sempurna terjadi, masyarakat akan bergeser memasuki kurve kemungkinan produksi. Contoh, seorang produsen monopoli tentu akan memasang harga yang sangat tinggi, sambil tetap membatasi jumlah produk yang dihasilkan, guna mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jika jumlah produsen tidak banyak, tentu tidak ada jaminan bahwa harga yang ditetapkan produsen ditentukan berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Dalam keadaan yang demikian doktrin tangan ajaib bisa lenyap.

Adapun salah satu kebijakan pemerintah yaitu melakukan subsidi pada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan golongan masyarakat tertentu tetapi dengan tidak merugikan atau membebani masyarakat yang lain. Contoh, pemerintah ingin agar harga beras di pasar tidak mahal dengan tanpa merugikan petani atau produsen beras. Tindakan yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan subsidi yang dapat berupa uang sebagai tambahan penghasilan kepada konsumen atau dapat pula dalam

bentuk penurunan harga barang melalui mekanisme harga pupuk atau harga sarana produksi yang lain. Dengan demikian konsumen hanya berkewajiban membayar sebagian dari harga yang sebenarnya dan selisihnya akan ditanggung oleh pemerintah.

Mengingat subsidi dalam bentuk *innatura* berupa penurunan harga hanya akan dinikmati oleh konsumen bila konsumen mengkonsumsi produk yang disubsidi oleh pemerintah, maka produsen yang produksinya diberi subsidi oleh pemerintah harus dapat memastikan bahwa produknya tersedia dan mudah didapat oleh masyarakat. Untuk itu, perusahaan perlu mendistribusikan (membangun rantai distribusi) produknya sampai ke lokasi-lokasi terkonsentrasinya masyarakat yang memerlukannya.

Menurut Taylor (2000), rantai distribusi ini merupakan kegiatan yang kompleks membutuhkan berbagai fasilitas dan aktivitas termasuk di dalamnya produksi dan penyaluran produk, dari produsen ke konsumen akhir. Kegiatan itu meliputi perencanaan dan pengelolaan permintaan dan penawaran, kebutuhan bahan baku, produksi dan jadwal produksi, pergudangan, pengendalian persediaan, pengiriman dan pelayanan konsumen. Kegiatan utama dari distribusi ini dapat dilihat pada gambar 1. Sedangkan fasilitas yang diperlukan termasuk bangunan pabrik, pusat distribusi, pusat pelayanan, dan operasi eceran. Produk didistribusikan dengan menggunakan kereta api, truk, jaringan perpipaan, telepon atau dengan mengutus orang.



Sumber : Kottler (1991)

Gambar 1. Kegiatan Utama Dalam Distribusi Produk

Hal yang membuat proses dan manajemen distribusi rumit adalah adanya ketidak pastian sepanjang rantai pasokan dan dalam setiap tahap. Bentuk ketidak pastian ini berupa kesalahan perkiraan, kelambatan pengiriman, rendahnya mutu bahan baku, rusaknya mesin dan peralatan, pembatalan pesanan, kesalahan informasi, kelambatan informasi dan berbagai kesalahan lain yang menyebabkan konsumen kesulitan mendapatkan produk sesuai dengan yang diinginkannya.

Oleh karena itu, agar manajemen distribusi efektif diperlukan kerjasama yang baik antara produsen dan konsumen dalam pola yang terkoordinasi melalui pertukaran informasi dan komunikasi yang terbuka. Komunikasi ini adalah merupakan aliran informasi yang rapat diantara konsumen, produsen, pusat distribusi, dan system transportasi yang memungkinkan perusahaan

mengembangkan rantai distribusi yang efisien. Produsen dan konsumen harus mempunyai tujuan yang sama.

Keberhasilan distribusi sangat ditentukan oleh kemauan produsen dan distributor untuk menjalankan tugas masing-masing. Konsumen sebagai pemakai akhir tentu akan sangat diuntungkan jika distribusi semakin lancar.

Tujuan dari distribusi barang ini menurut Kottler (1991) adalah agar perusahaan dapat menempatkan produknya pada tempat dan waktu yang tepat dengan biaya yang rendah agar harga produk juga dapat ditekan. Sedangkan Taylor (2000) menambahkan selain ketiga hal tersebut di atas juga agar kualitas produk yang diterima konsumen tetap dapat terjamin.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang, mengingat Kabu-

paten Malang adalah salah satu lumbung pangan Jawa Timur yang secara langsung jelas merupakan konsumen pupuk.

Populasi dari penelitian ini adalah keluarga petani dan pimpinan penyalur pupuk baik di tingkat agen, distributor maupun pengecer yang terdapat di Kabupaten Malang. Jumlah rumah tangga petani di Kabupaten Malang menurut sensus penduduk tahun 2000 adalah sebanyak 305.423 yang tersebar dalam 33 Kecamatan (Kab. Malang Dalam Angka 2002).

Untuk menentukan petani yang akan dijadikan sampel dilakukan dengan metode multi Stage Cluster Sampling. Langkah awal yang dilakukan adalah menentukan 3 kecamatan yang dipilih sebagai sampling. 3 kecamatan yang dipilih ini dengan klasifikasi dasar mudah dijangkau, cukup mudah dan sulit dijangkau, alasannya karena ketersediaan pupuk pada suatu daerah sangat tergantung dari mudah atau sulitnya untuk menjangkau daerah tersebut. Untuk itu peneliti memilih Kecamatan Dau, kepanjen, dan Kecamatan Pujon.

Dari tiap kecamatan ini selanjutnya akan dipilih satu desa. Petani yang terdapat dalam desa terpilih seluruhnya akan dijadikan responden. Karena pemilihan desa ini dilakukan secara random maka jumlah petani yang akan dipilih sebagai responden belum bisa ditentukan karena tergantung dari desa yang akan terpilih nanti.

Sedangkan untuk penyalur pupuk sampel dipilih dengan tehnik quota stratified sampling dimana untuk distributor diperoleh 4 responden, penyalur 7 responden, pengecer 8 responden .

Adapun Teknik pengumpulan data secara formal dan informal yang digunakan penelitian ini, mencakup penggalan informasi awal dari pustaka dan publikasi yang tersedia, penggunaan angket formal dibuat semi terbuka yaitu terdiri dari sejumlah pertanyaan disertai alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh responden, dan pertanyaan terbuka yang jawabannya diserahkan sepenuhnya kepada responden. Angket ini diisi oleh responden jika memungkinkan, atau diisi oleh peneliti berdasarkan jawaban responden, dan wawancara dengan responden dilakukan untuk mendapatkan informasi secara mendalam (*indepth interview*), guna mendapatkan jawaban yang tidak tercantum dalam angket.

Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang akan menjadi fokus penelitian. Variabel tersebut yaitu: 1. *Pupuk* adalah sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani untuk menyuburkan tanaman; 2. *Tepat waktu* adalah kesesuaian periode ketersediaan pupuk dengan jadwal pemupukan yang dilakukan petani; 3. *Tepat jumlah* adalah kesesuaian antara jumlah pupuk yang dibutuhkan petani dengan jumlah pupuk yang diperolehnya; 4. *Tepat harga* adalah kesesuaian antara harga eceran pupuk yang ditetapkan pemerintah dengan harga pupuk yang harus dibayar petani; 5. *Tepat mutu* adalah kesesuaian antara karakteristik pupuk yang seharusnya diterima petani khususnya kandungan kimiawinya, dengan karakteristik pupuk yang secara nyata diperoleh petani; 6. *Tepat tempat* adalah Kesesuaian antara lokasi petani mendapatkan pupuk dengan lokasi seharusnya petani mendapatkan pupuk tersebut; dan 7. *Tepat jenis* adalah

Kesesuaian antara jenis yang harusnya dipakai dengan jenis pupuk yang didapat.

Untuk mengetahui tingkat efektivitas sistem distribusi pupuk digunakan ratio perbandingan antara rata-rata target yang diharapkan dengan realita yang terjadi. Namun sebelum ratio tingkat kegagalan diperoleh, dilakukan terlebih dahulu uji perbedaan dua rata-rata guna mengetahui apakah terdapat perbedaan nyata antara target dengan realisasi. Dengan kriteria uji: H_0 diterima bila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ dan H_0 ditolak Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$.

Sedangkan untuk mengetahui bagaimana distribusi pupuk pada masing-masing pelaku digunakan analisis Kai Kuadrat (χ^2) sebagai berikut :

$$\chi^2 = \sum \frac{\{f_0 - f_t\}^2}{f_t}$$

Dimana : χ^2 = Nilai Kai Kuadrat; F_0 = Frekuensi yang diperoleh dari survai; F_t = Frekuensi teoritis

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil pertanian di Kabupaten Malang yang potensial antara lain padi, jagung, dan singkong. Hasil panen tahun 1998 adalah sebagai berikut: produksi padi 238.261 ton dari areal panen seluas 65.687 hektar; produksi jagung 259.107 ton dari areal panen seluas 72.158 hektar; dan produksi singkong 286.530 ton dari areal panen seluas 15.701. Selain tanaman tersebut, daerah ini memiliki potensi besar atas

Tabel 1. Produksi Pertanian

Jenis Tanaman	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Padi	65.687	389.261
Jagung	72.158	259.107
Ubi Kayu	15.701	286.530

tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan terutama di Batu.

Hasil produksi perkebunan Kabupaten Malang berdasarkan Data BPS tahun 1998 adalah sebagai berikut: produksi kapuk randu 1.307,84 ton, kelapa 10.000 ton, dan kopi 5.800 ton. Selain itu, daerah ini juga memiliki potensi hasil tanaman cengkeh, tembakau, tebu.

Perikanan di kabupaten Malang tahun 1998 menunjukkan hasil berikut: ikan darat yang meliputi ikan dari perairan umum, kolam, keramba, dan tambak mencapai 2.594,33 ton, dan hasil ikan laut mencapai 2.831,71 ton. Daerah Malang Selatan juga dikenal sebagai penghasil lobster.

Populasi ternak tahun 1998 adalah sebagai berikut : sapi 201.363 ekor, kambing/domba 193.824 ekor, sapi perah 47.807 ekor, dan unggas 3.191.611 ekor. Hasil ternak potong: sapi 20.845 ekor, kambing/domba 6.005 ekor, dan unggas (telur) 6.425.

Pada Tahun 1998, industri makanan, minuman, dan tembakau berjumlah 70 unit usaha, menyerap 18.473 tenaga kerja, dan nilai produksinya lebih dari Rp 243,28 milyar; industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit berjumlah 21 unit usaha, menyerap 6.516 tenaga kerja dengan nilai produksi lebih dari Rp 251,25 milyar; industri kayu dan barang dari kayu berjumlah 17 unit usaha, menyerap 5.216 orang tenaga kerja, dengan nilai produksi lebih dari Rp 117,18 milyar.

Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka, 1998: BPS

Tabel 2. Produksi Perkebunan

Jenis Tanaman	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Kapok Randu	2.425	1.307,84
Kelapa	-	10.000
Kopi	-	5.800

Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka, 1998: BPS

Tabel 3. Produksi Perikanan

Jenis Ternak	Jumlah (Ekor)	Produksi (ton)
Ikan Darat	-	2.594,33
Kambing/Domba	193.824	6.005 ekor
Sapi	201.363	20.845 ekor
Unggas	3.191.611	Telur 6.425
Ikan darat/laut		5.426,04 ton

Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka, 1998: BPS

Tabel 4. Hasil Produksi Industri

Jenis Industri	Unit Produksi	Tenaga Kerja	Nilai Industri (Rp)
Makanan dan Minuman	70	18.473	243.283.690.000
Tekstil, pakaian jadi, dan kulit	21	6.516	251.252.250.000
Kayu & barang kayu	17	1.880	40.053.301.000
Kimia & barang dari bahan kimia	23	5.216	177.181.813.000

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka, 1998:BPS

Masalah pupuk merupakan masalah yang penting bagi petani, tanpa pupuk maka petani tidak dapat berkerja. Padahal sektor pertanian merupakan sumber utama pendapatan. Sehingga tidak mengherankan bila petani berusaha keras untuk mendapatkan pupuk. Tanpa pupuk dapat dipastikan produksi akan turun dan pada akhirnya akan berakibat pada turunnya pendapatan petani.

Akhir-akhir ini pupuk sangat sulit diperoleh terutama menjelang musim tanam. Kondisi ini sudah terjadi lebih kurang 8 tahunan dan tanpa ada

solusi untuk mengatasinya, akibatnya petani tiap menjelang musim tanam selalu diresahkan dengan kelangkaan pupuk di pasaran. Kelangkaan pupuk ini disebabkan terbatasnya produksi dan distribusi pupuk yang masih kacau akibat diserahkan kepada pihak distributor bukan KUD seperti dulu.

Distributor merupakan tangan pertama pupuk, sebab dari situ akan mengalir pupuk ke pengecer-pengecer dan baru ke petani. Peran distributor sangatlah penting karena mereka pemegang kuncinya lancar tidaknya distribusi pupuk. Permasalahan tidak

semua distributor adalah orang baik-baik, sehingga jika ada peluang untuk berspekulasi dan mencari keuntungan maka hal itu akan dilakukan. Kondisi ini sudah terjadi pada saat harga pupuk di pasaran sangat tinggi di atas HET (harga eceran tertinggi) yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka para distributor lebih menyukai menjual pupuk ke pihak lain atau melakukan ekspor secara ilegal.

Perbedaan harga ini makin tinggi bila yang dijual adalah pupuk bersubsidi yang semestinya ditujukan untuk para petani tapi dijual pada pihak lain. Sudah dapat dipastikan petani tidak dapat menikmati subsidi yang diberikan oleh Pemerintah. Dengan harga pupuk sebesar Rp 1.050,- per kg dan rencana Pemerintah yang akan menaikkan harga pupuk, sudah pasti banyak petani yang tidak setuju. Bagi mereka yang jadi masalah adalah distribusi dan bukan harga, maka sudah sewajarnya bila distribusi yang perlu dibenahi dulu, walaupun dalam kenyataannya petani sudah terbiasa membeli pupuk dengan harga mahal. Bila masalah distribusi pupuk tidak dibenahi, kemudian harga pupuk dinaikan sungguh akan semakin memberatkan para petani.

Belum lagi masalah hambatan distribusi, pemindahan dari Kalimantan ke Jawa Timur bukan perkara sederhana. Proses penyaluran pupuk menghadapi kendala transportasi, yaitu tidak adanya pengampalan pupuk.

Masalah distribusi sudah lama menjadi masalah nasional, sebab dari total permintaan pupuk urea bersubsidi sebanyak 4,3 juta ton, lebih dari 60 persennya datang dari Jawa. Padahal 3 pabrik pupuk berada di Sumatera dan Kalimantan. Dengan jarak berjauhan itu, biaya distribusi menjadi amat

mahal, apalagi setelah adanya kenaikan harga BBM. (Kompas, Edisi 10-15 April 2006).

Adapun dalam Penentuan harga pupuk sampai pendistribusian tidaklah sederhana, karena untuk sampai ke petani pupuk harus melalui jalur birokrasi dan distribusi yang tidak sederhana. Harga pokok produksi (HPP) pupuk ditetapkan kementerian BUMN, penentuan jumlah pupuk bersubsidi yang harus disalurkan dan penentuan harga eceran tertinggi (HET) ditentukan oleh menteri Pertanian kemudian penyaluran dan pengadaan pupuk melalui menteri perdagangan, sedangkan pembayaran subsidi melalui menteri keuangan.

Panjangnya birokrasi menunjukkan bahwa pupuk bukanlah barang biasa, sehingga pupuk perlu diawasi oleh Pemerintah. Keberadaan pupuk sangat penting untuk menunjang sektor pertanian khususnya pangan.

Pada masa orde baru Indonesia pernah menjadi negara yang berswasembada beras, sehingga tidak mengherankan bila stok pangan pada masa itu dijaga betul oleh Pemerintah, bahkan sektor ini dijadikan sebagai komoditas politik. Begitu pula keberadaan pupuk dijaga oleh Pemerintah melalui distribusi resmi (KUD), dampaknya harga pupuk dan beras relatif stabil. Namun pada tahun 1998 distribusi pupuk diserahkan ke swasta, maka tidaklah mengherankan bila muncul berbagai masalah berkaitan dengan pupuk.

Permintaan pupuk yang sangat tinggi hanya terjadi pada masa tanam padi sekitar bulan April dan Oktober. Pada masa itu justru pupuk menjadi angka akibatnya harga pupuk melambung diatas HET. Pasokan pupuk yang seret menambah beban

makin meningkatnya harga pupuk. Kios, pengecer resmi hingga distributor tak punya stock, karena sudah habis disalurkan sesuai dengan alokasi yang diberikab oleh produsen. Sebaliknya produsen sendiri tidak berani memberikan tambahan kepada distributor. Mereka tidak berani memberikan tambahan pasokan pupuk melebihi ketentuan distribusi yang digariskan oleh surat keputusan Menteri pertanian No.

505/Kpts/SR130/12/2005, tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2006.

Dalam SK tercetak kebutuhan pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2006 untuk pupuk Urea sebanyak 4,3 juta ton dengan rincian sebagai berikut: Tanaman pangan & hortikultura sebanyak 344.788 ton, Perkebunan Kecil sebanyak 843.241 ton, Peternakan sebanyak 12.051 ton.

Tabel 5. Jenis dan Jumlah Pupuk Bersubsidi

Jenis Pupuk	Jumlah Pupuk Bersubsidi	Jumlah Permintaan Riil	Selisih
Urea	4.027.417	4.500.000	1.400.000
SP 36	750.000	2.400.000	1.600.000
ZA	600.000	880.000	280.000
Phonska	230.000	634.711	464.711

Sumber : Kompas, Edisi 1 Januari 2006

Produsen tidak berani menambah permintaan pupuk disebabkan pupuk termasuk barang yang diawasi, jika disalurkan melebihi kuota dianggap menyelewengkan. Akibatnya dari seringlangkanya pupuk di pasaran, maka terjadilah gesekan antara mereka yang terlibat dalam masalah pupuk, yaitu pejabat daerah, kelompok tani dan petani.

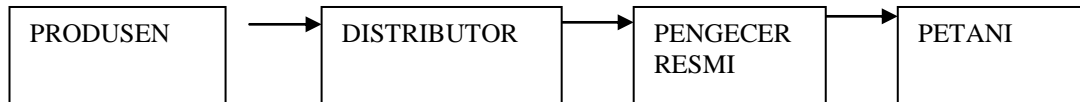
Perbedaan jumlah pupuk yang bersubsidi dengan permintaan riil di lapangan mengakibatkan pupuk selalu mengalami kelangkaan. Pupuk subsidi akan selalu dikejar petani karena harga yang relatif murah padahal jumlahnya sangat terbatas.

Terjadinya selisih antara pupuk bersubsidi dengan permintaan riil, akan mengakibatkan kekurangan pupuk. Pupuk bakalan langka yang dapat mengakibatkan kepanikan petani, hal ini sangat berbahaya karena dapat

mengganggu produksi sektor pertanian khususnya pangan.

Masalah distribusi merupakan masalah yang tidak boleh diabaikan. Untuk sampai produk ke konsumen diperlukan jalur distribusi. Semakin pendek jalur distribusi, maka semakin murah harga dan pada akhirnya semakin efisien, sebaliknya Distribusi pupuk di Indonesia melalui 3 jalur.

Dalam kenyataannya distributor banyak menyalurkan pupuk khususnya pupuk bersubsidi di kios-kios atau pengecer tidak resmi, akibatnya jalur distribusi pupuk makin panjang dan berdampak pada naiknya harga. Di samping itu harga di tingkat distributor sudah lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET), maka harga pupuk sulit untuk sesuai dengan HET. Bagi pengecar yang dapat dilakukan hanyalah memperkecil margin keuntungan mereka.



Gambar 2. Jalur Distribusi Pupuk

Produksi pupuk yang tidak seimbang dengan permintaan juga menjadi penyebab langkanya pupuk dan walaupun ada harga sudah sangat tinggi. Kondisi ini rutin dialami petani setiap menjelang musin tanam tiba. Sebagai contoh :

Kebutuhan pupuk urea bersubsidi di tingkat nasional tahun 2005 sebanyak 5,7 jutaan ton. Berdasarkan SK menteri pertanian jumlah yang disubsidi hanya 4,02 juta ton, sampai bulan Desember 2005 jumlah yang sudah disalurkan sebesar 3,9 juta ton. Sudah dapat dipastikan akan terjadi kekurangan pupuk sekitar 500.000 ton.

Meskipun sudah disubsidi, biaya distribusi pupuk sangat tinggi lebih-lebih dengan adanya kenaikan harga BBM. Subsidi tidak mampu menutupi biaya produksi dan distribusi sampai ke petani.

Masalah pupuk yang terjadi di Indonesia terutama di Jawa setiap menjelang masa tanam tiba, merupakan masalah rutin dan klasik. Artinya persoalan pupuk terjadi akibat kelangkaan pupuk di pasaran walaupun ada harga sangat tinggi, yaitu di atas HET, sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah pupuk di Indonesia lebih pada masalah produksi yang tidak mencukupi. Namun, produksi saja tidaklah cukup, sebab ada masalah distribusi dan subsidi harga.

Dari data yang ada menunjukkan bahwa produksi pupuk dari tahun ke tahun relatif konstan. Dari 5 industri pupuk dengan produksi pupuk sebesar 5,8 – 6 juta ton pertahun, padahal kebutuhan riil dari 31 propinsi sebesar 5.773. 437 ton, dengan alokasi Pulau Jawa sebesar 2.728.261 ton yang dipenuhi oleh 3 pabrik, yaitu: Pabrik Pupuk Urea Petrokimia Gresik, Pabrik Pupuk Kujang 1 di Cikampek, dan Pabrik Pupuk Kujang 2 di Cikampek. Dengan produksi pupuk sebesar 1,5 juta ton yang dapat direalisasi hanya sebesar 90 % atau 1,3 juta ton, sehingga ada gap sebesar 1,4 juta ton dan ini sangat riskan.

Kelangkaan pupuk di Kabupaten-Kabupaten di Jawa Timur terjadi akibat pengawasan dan distribusi pupuk terutama dari kios ke petani sangat lemah. Akibatnya petani dirugikan, petani harus membeli pupuk di atas harga HET. Disamping itu banyak distributor nakal yang mejual pupuk di luar daerah yang seharusnya. Kondisi makin memperparah harga pupuk.

Di Banyuwangi, harga pupuk Urea Rp 52.500,- persak dipasaran menjadi Rp 67.000,- persak. (isi 50 kg), harga pupuk SP 36 antara Rp 85.000,- sampai Rp 87.000,-. Di Kediri, Harga pupuk Urea Rp 62.000,- persak, Harga pupuk ZA sebesar Rp

130.000,-. Di Jember, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengusulkan 61.000 ton pupuk urea bersubsidi, namun yang tersedia hanya 5 5.111 ton, dan di Kabupaten Malang, Kelangkaan pupuk di kabupaten Malang di manfaatkan oleh sejumlah pengecer ilegal untuk menjual pupuk di atas HET yang ditetapkan oleh Pemerintah. Akibatnya harga menjadi sangat mahal. Di kabupaten Malang terdapat 10 distributor pupuk resmi dengan jumlah pengecer resmi dan tidak resmi yang jumlahnya mencapai puluhan.

Pasokan pupuk yang seret mengakibatkan harga pupuk melambung tinggi. Kios, pengecer resmi hingga distribusi tidak mempunyai stok karena sudah habis disalurkan sesuai dengan alokasi yang diberikan oleh produsen. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peraturan menteri pertanian, yaitu peraturan menteri No. 505/Kp.ts/SR 130/12/2005, tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di sektor pertanian diatur, bahwa penyaluran pupuk dari produsen, distributor, sampai kepada pengecer resmi dilakukan melalui sistem kebutuhan kelompok yang disetujui oleh petugas teknis/penyuluh kepada cabang dinas setempat. Peraturan ini ditetapkan 26 Desember 2005 dan mulai diberlakukan 1 juni 2006.

Peraturan menteri soal distribusi pupuk dengan sistem

tertutup berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok itu dinilai sulit untuk diimplementasikan. Selain menambah jalur administrasi dan birokrasi, sistem itu memungkinkan rencana kebutuhan rencana kebutuhan pupuk: *Pertama*, Dibuat lebih untuk dijual lagi; *Kedua*, Tidak semua petani tergabung dalam kelompok petani tani sehingga ada kemungkinan tidak dapat membeli pupuk bersubsidi.

Ketiga, Tidak semua petani atau kelompok tani mampu membuat RDKK secara benar; *Keempat*, Asumsi penggunaan pupuk yang berbeda antara petani dan pemerintah. Petani cenderung boros dalam penggunaan pupuk, yaitu 4-5 kwintal perhektar untu pupuk urea sedang Departemen Pertanian memperkirakan 2,5 kwintal perhektar.

Untuk mengatasi kendala masalah kebocoran pupuk bersubsidi, pemerintah mengeluarkan aturan baru berdasarkan SK Memperindag Nomor 03/M.Dag/Per/2/2006 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk, ektor pertanian distribusi di lini III (kabupaten) harus melalui distribusi resmi yang ditunjuk oleh produsen. Produsen wajib untuk menyampaikan daftar distributor dan pengecer di wilayahnya. Kemudian pengecar tersebut hanya boleh menebus pupuk dari satu distributor saja. Tujuannya untuk mempercepat distribusi hingga pengecer.

Tabel 6. Harga pupuk di kabupaten Malang

Jenis Pupuk	Harga/Kg (Rp)	Harga/Kwt (Rp)	Harga di Pasaran (Rp)	Keterangan
Z A	950	95.000	160.000	Harga normal Rp 110.000

UREA	525	52.500	105.000	Harga normal 67.000
------	-----	--------	---------	------------------------

Menurut Menteri Perdagangan, Pemerintah akan memberikan sanksi berat kepada pengecer jika melakukan penyelewengan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi akan dicabut izin usahanya. Permasalahan pupuk pada intinya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *Produksi Kurang*, Permintaan pupuk dalam volume besar terjadi secara serentak, terutama di Jawa. Permintaan pupuk yang tinggi ini terjadi setiap menjelang musim tanam, yaitu pada bulan Oktober-Maret. Bagi petani permintaan pupuk pada musim tanam ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Permintaan yang tinggi ini tidak cukup dipenuhi oleh pabrik di Jawa, maka sebagai alternatifnya kekurangan pupuk didatangkan dari pabrik di luar Jawa.

Kesenjangan/gap pupuk bersubsidi, Jumlah pupuk urea yang disetujui disubsidi sebesar 4.027.417 ton, padahal kebutuhan untuk tanaman padi sebesar 4.500.000 ton, berarti ada selisih sebesar 472.583 ton. Belum lagi kebutuhan petani tambak yang juga memerlukan pupuk urea untuk pemupukan tambak. Mereka membeli pupuk bersubsidi padahal tidak masuk dalam golongan petani yang diberi subsidi.

Dari tabel 7, jelas pupuk akan selalu mengalami kelangkaan karena antara jumlah pupuk yang di subsidi dengan jumlah permintaan pupuk yang riil terjadi selisih/gap yang tidak sedikit. Akibatnya pupuk akan selalu langka dan pada akhirnya akan menimbulkan kepanikan petani setiap kali menjelang musim tanam.

Dalam penelitian ini responden di bagi menjadi 4, yaitu Distributor, Penyalur / Agen, Pengecer, dan Petani. Keempat responden tersebut merupakan komponen yang menentukan masalah pupuk. Masing-masing komponen mempunyai peran sendiri-sendiri namun tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Kelangkaan pupuk sebenarnya bisa ditelusuri dari 4 komponen tersebut. Namun keempatnya bukanlah faktor penentu yang utama untuk mengatasi masalah kelangkaan pupuk, sebab bagaimanapun juga masalah pupuk melibatkan pemerintah sebagai produsen sekaligus yang membuat kebijakan masalah perpupukan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh jumlah responden untuk masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel 8.

Dari tabel diatas, jumlah responden yang paling banyak adalah petani, yaitu sebanyak 10 responden atau 34,48 persen, jumlah yang paling sedikit adalah distributor, yaitu hanya 4 responden atau 13,79 persen. Sedikitnya jumlah distributor ini memang di lapangan jumlah sedikit dan sangat sulit ditemui, sebaliknya jumlah petani dan pengecer jumlahnya memang banyak dan mudah ditemui. Gambaran masing-masing responden dapat dijelaskan yaitu Distributor merupakan tangan pertama dari pemasaran pupuk setelah dari produsen. Peran distributor adalah menyalurkan pupuk kepada rantai pemasaran dibawahnya, yaitu agen / penyalur. Untuk menjadi distributor pupuk tidaklah mudah diperlukan beberapa persyaratan yang sudah

ditetapkan untuk memperoleh Delivery Order (DO).

Tabel 7. Jumlah Pupuk Bersubsidi dan Selisihnya

Jenis Pupuk	Jumlah Pupuk yang disubsidi	Jumlah Rill	Selisih / Gap
UREA	4.027.417	4.500.000	472.583
SP 36	750.000	2.400.000	1.650.000
Z A	600.00	880.000	280.000
Phonska	230.000	634.711	404.711

Sumber : Kompas, 2 Januari 2006

Tabel 8. Jumlah Responden

No.	Responden	Jumlah	Prosentase
1.	Distributor	4	13,79
2.	Penyalur/Agen	7	24,14
3.	Pengecer	8	27,59
4.	Petani	10	34,48
	Total	29	100

Dari hasil penelitian, rata-rata distributor memulai usaha sudah lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang sudah menjadi distributor selama 25 tahun. Dilihat dari tingkat pendidikannya sangatlah beragam yaitu ada yang sarjana, tamat SMP dan SMA. Distributor yang dengan tingkat pendidikan sarjana merupakan distributor dengan lamanya usaha 13 tahun jauh dibawah distributor lain yang rata-rata 25 tahun. Bila dilihat dari pekerjaan utama distributor sebagian besar adalah pedagang dan hanya 1 responden sebagai petani. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi distributor pupuk tidak dapat dibuat sebagai pekerjaan sampingan.

Adapun jenis pupuk yang mereka salurkan adalah pupuk bersubsidi dan non subsidi kecuali 1 distributor yang hanya menyalurkan pupuk bersubsidi. Adapun jenis pupuk yang disalurkan adalah jenis

pupuk non organik dan hanya 1 responden yang kadang-kadang menjual pupuk organik, dengan alasan jarang ada permintaan.

Dari 4 responden 3 responden yang menyatakan bahwa distribusi pupuk tepat waktu dan hanya 1 responden yang menyatakan tidak tepat waktu. Demikian pula dengan jumlah pupuk yang mereka minta 3 responden menyatakan sesuai dengan permintaan dan hanya 1 responden yang menyatakan tidak sesuai dengan permintaan. Sebaliknya untuk jaminan kualitas keaslian pupuk yang mereka terima, semua setuju bahwa kualitas pupuknya terjamin keasliannya.

Apabila ditanyakan tentang harga pupuk, apakah sesuai dengan harga eceran yang ditetapkan (HET), maka semua distributor menjawab bahwa harga pupuk sesuai dengan HET pada hari-hari biasa dan diatas HET pada saat musim tanam. Hal ini

sesuai dengan hukum permintaan dimana harga akan naik bila permintaan meningkat.

Adapun kendala yang dihadapi oleh distributor adalah stok pupuk yang tetap padahal jumlah permintaan naik terutama pada saat musim tanam, akibatnya pupuk menjadi langka. Pasokan yang kurang ini menyebabkan distribusi pupuk menjadi tidak merata. Bahkan disinyalir oleh seorang responden rawan untuk diselewengkan.

Sebagai saran untuk mengatasi masalah tersebut, mereka sepakat, bahwa stok pupuk harus ditambah terutama menjelang masa tanam, karena permintaan pasti naik. Penambahan stok ini harus juga diikuti dengan distribusi pupuk yang merata dan tepat waktu kalau perlu diawasi.

Agen atau Penyalur merupakan lini kedua setelah distributor dalam pemasaran pupuk. Untuk menjadi agen atau penyalur ini tidak sulit distributor. Dari hasil penelitian, ada 7 agen atau penyalur sebagai responden, dengan rata-rata lamanya usaha lebih dari 10 tahun (10,14). Dari 7 responden dalam penelitian ini sebanyak 6 responden mempunyai pekerjaan utama sebagai pedagang dan hanya 1 responden yang berstatus sebagai pegawai negeri (PNS). Tingkat pendidikan yang ditamatkan responden SLTP sebanyak 4 responden, SLTA sebanyak 2 responden dan sarjana (S1) sebanyak 1 responden.

Adapun pupuk yang dijual adalah pupuk non bersubsidi sebanyak 4 responden dan pupuk bersubsidi dan non bersubsidi sebanyak 3 responden. Mereka menjual pupuk organik kadang-kadang saja sebagai pendukung, yaitu 2 responden dan 5 responden tidak menjual pupuk

organik dengan alasan tidak adanya permintaan, bau yang tidak disukai petani. Kalaupun ada permintaan pupuk organik biasanya pembeli / petani mencari sendiri ke peternakan.

Dari 7 responden hanya 1 responden yang menyatakan bahwa distribusi pupuk sudah tepat waktu, sebaliknya 6 responden menyatakan tidak tepat waktu. Biasanya untuk jenis pupuk bersubsidi tidak tepat waktu, sebaliknya untuk jenis pupuk non bersubsidi tepat waktu.

Harga jual pupuk menurut responden sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan kualitas pupuk terjamin demikian pula untuk permintaan sudah sesuai. Masalah distribusi sebanyak 4 responden mengatakan tidak sesuai dengan lokasi atau tempat dan 3 responden mengatakan sesuai dengan lokasi atau tempat.

Sebagai kendala dalam masalah pupuk adalah sama seperti distributor, yaitu permintaan tinggi, tetapi persediaan sedikit, distribusi tidak merata akibatnya pupuk jarang ada di pasaran. Masalah ini juga ditengarai ada penyalahgunaan dari pendistribusian pupuk oleh pemerintah.

Pengecer merupakan kelompok distribusi pemasaran yang paling bawah, artinya pengecer berhubungan langsung dengan konsumen / pembeli. Pengecer melakukan transaksi dengan menjual produknya secara eceran bukan dalam partai besar seperti distributor atau agen. Dari sinilah sebetulnya pupuk dapat terditeksi apakah mencukupi atau sebaliknya.

Dari hasil penelitian diperoleh jumlah responden pengecer sebanyak 10 orang, dengan rata-rata lama usaha 6,6 tahun. Lama usaha sebagai

pengecer adalah 20 tahun dan yang paling sedikit adalah 6 bulan. Pekerjaan utama pengecer adalah pedagang sebanyak 7 responden, sebagai petani 2 responden dan wiraswasta 1 responden. Adapun tingkat pendidikan pengecer sebanyak 3 responden yang menamatkan pendidikan sekolah dasar (SD), 3 responden menamatkan tingkat pendidikan SLTP, 1 responden dengan tingkat pendidikan SLTA, dan 3 responden sarjana (S1).

Status pupuk yang dijual sebagian besar yaitu 7 responden menjual pupuk non bersubsidi dan 3 responden menjual pupuk bersubsidi dan non bersubsidi. Untuk jenis pupuk organik 3 responden mengatakan kadang-kadang menjual kalau ada permintaan untuk melengkapi saja. Sebanyak 7 responden tidak menjual pupuk organik dengan alasan persediaan tidak ada yang disebabkan permintaan tidak ada. Ketersediaan pupuk menurut mereka tidak tepat waktu sebanyak 6 responden dan 4 responden yang mengatakan tepat waktu.

Jumlah pupuk yang diminta sebanyak 4 responden mengatakan tidak sesuai dan sebanyak 6 responden mengatakan sesuai dengan jumlah yang mereka minta. Untuk kualitas pupuk semua responden sepakat bahwa pupuk yang mereka jual terjamin kualitasnya, namun untuk pupuk bersubsidi sulit diperoleh sebaliknya pupuk non bersubsidi mudah diperoleh.

Masalah distribusi pupuk sebanyak 7 responden mengatakan sesuai dengan tempat / lokasi dan 3

responden mengatakan tidak sesuai dengan lokasi / tempat.

Adapun kendala yang dihadapi oleh pengecer adalah banyaknya permintaan terutama menjelang masa tanam tetapi stok atau persediaan terbatas. Pupuk bersubsidi sulit diperoleh yang disebabkan distribusi tidak merata atau distribusi tidak lancar yang masalah ini disebabkan adanya penyelewengan pupuk. Mestinya pada saat permintaan naik stok pupuk ditambah demikian pula jatah untuk petani tidak merata akibatnya harga naik.

Dari permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa distribusi pupuk selama ini kurang efektif bagi pengecer dan petani jika dilihat dari tepat waktu. Menurut mereka pupuk tidak pernah tepat waktu, tetapi sebaliknya menurut distributor dan penyalur pupuk sudah tepat waktu. Distribusi pupuk tepat waktu yang berhenti pada saluran distributor dan penyalur, mengakibatkan pupuk tidak sampai ke pengecer dan petani tepat waktu. Hal ini dapat dilihat pada saat permintaan pupuk naik, pupuk tidak ada terutama untuk pupuk bersubsidi yang dicari petani. Hal ini tidak bermasalah bagi pupuk non bersubsidi yang keberadaannya tidak menimbulkan masalah, kecuali harga yang tinggi bagi petani. Maka saran yang diberikan adalah menambah persediaan pupuk pada saat musim tanam, distribusi pupuk agar lebih merata sehingga bisa sampai ke petani. Disamping itu harga pupuk jangan terlalu mahal agar petani mampu membelinya.

Tabel 9. Distribusi Pupuk dilihat dari 6 situasi tepat menurut Responden

Variabel Responden	Tepat					
	Waktu	Jumlah	Harga	Mutu	Tempat	Jenis
Distributor (4)	3	1	4	4	4	4
Penyalur (7)	7	5	7	7	7	6
Pengecer (8)	-	4	8	8	7	3
Petani (10)	1	1	3	3	2	1
	11	11	21	22	20	14

Petani merupakan rantai distribusi terakhir, karena petani pemakai produk pupuk. Konsumsi pupuk sebagian besar adalah petani, sehingga mereka yang berhubungan langsung dengan pupuk. Kelangkaan pupuk jelas sangat memukul mereka sebab tanaman tanpa pupuk dapat dipastikan hasilnya tidak memuaskan dan pada akhirnya merugikan petani. Bagi petani ketersediaan pupuk dengan harga yang terjangkau sangatlah membantu, sebab bagaimanapun juga menjadi petani sudah menjadi pekerjaan mereka dan sangat sulit untuk berpindah pekerjaan lebih-lebih pada saat seperti ini dimana tingkat pengangguran masih sangat tinggi.

Dari hasil penelitian tingkat pendidikan petani adalah SLTP, yaitu sebanyak 5 responden atau 50 persen dan 5 responden atau 50 persen pendidikan SD. Lahan yang dimiliki merupakan lahan milik sendiri dengan jenis tanaman padi (8 responden), sayuran (1 responden) dan jagung (1 responden).

Untuk memperkuat kesimpulan dari suatu tabel yang menghubungkan dua variabel atau lebih, dapat digunakan analisis chi kuadrat. Untuk mencari kai kuadrat, langkah pertama adalah menghitung frekuensi teoritis atau frekuensi yang diharapkan atau expected frequencies, yaitu frekuensi yang terjadi bila tidak ada perbedaan dalam frekuensi pada dua variabel pokok. Frekuensi teoritis dihitung dari jumlah kolom dikalikan jumlah baris bagi setiap kotak. (Masri Singarimbun, 1995).

Dari pengolahan dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil nilai kai kuadrat (χ^2) sebesar 0,500 signifikan pada level 0,001 dengan nilai χ^2 tabel sebesar 11,34, maka berada pada daerah H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi pupuk cenderung efektif dilihat dari 6 situasi tepat, yaitu tepat waktu, jumlah, harga, mutu, tempat dan jenis.

Permasalahan pupuk pada dasarnya terletak pada petani, artinya

distribusi menjadi masalah jika sudah sampai ke petani. Pada tingkat distributor dan penyalur atau agen tidaklah menjadi masalah semua sesuai dengan 6 situasi tepat. Mengapa pada tingkat petani distribusi menjadi masalah? ada beberapa hal yang dapat menjelaskan, yaitu 1. Jumlah pupuk bersubsidi yang diminta petani jumlahnya sangat terbatas, sehingga untuk mendapatkannya harus antri. Permintaan pupuk bersubsidi tinggi karena harga yang murah dibandingkan harga pupuk non bersubsidi, 2. Pemakaian pupuk an organik masih sangat tinggi dikalangan petani, hal ini disebabkan belum membudayanya penggunaan pupuk organik di kalangan petani padahal pemakaian pupuk ini jauh lebih ramah lingkungan. Kondisi ini disebabkan produksi pupuk organik di pasaran sangat terbatas bahkan cenderung langka.

Penutup

Dari hasil pengamatan dan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Dengan menggunakan analisis kai kuadrat diperoleh nilai kai kuadrat (χ^2) sebesar 0,500 dengan nilai χ^2 tabel sebesar 11,34, signifikan pada level 0,001 maka berada pada daerah H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi pupuk cenderung efektif dilihat dari 6 situasi tepat, yaitu tepat waktu, jumlah, harga, mutu, tempat dan jenis, 2. Pupuk menjadi masalah jika sampai ke petani. Pada tingkat distributor dan penyalur atau agen tidaklah menjadi masalah semua sesuai dengan 6 situasi tepat. Dengan demikian bukan distribusinya yang salah tetapi produksi pupuk khususnya pupuk bersubsidi jumlahnya kurang di pasaran.

Sebagai saran dari penelitian ini adalah Pemerintah hendaknya lebih fokus lagi pada masalah produksi pupuk bukan distribusi. Jumlah pupuk khususnya yang pupuk bersubsidi perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan petani kelangkaan pupuk disebabkan terbatasnya jumlah pupuk bersubsidi. Untuk menentukan jumlah petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi tidaklah mudah, maka diperlukan kerja keras dan disertai dengan kejujuran pada petugas yang mendata di lapangan. Jika jumlah pupuk bersubsidi mencukupi sesuai dengan permintaan petani maka masalah kelangkaan pupuk tidak akan terjadi. Permasalahannya mampukah Pemerintah membuat kebijakan yang benar-benar pro kepada petani?

DAFTAR PUSTAKA

- Anoname. 2003. "Produsen Pupuk Ingin Subsidi Gas Tetap Satu Dollar AS". *Kompas*. 11 Desember 2003
- Anoname. 2004. "Ditindak Tegas, Produsen Yang Tetap Melakukan Ekspor Pupuk". *Kompas*. 6 Pebruari 2004.
- Anoname. 2004. "Ribuan Ton Pupuk Urea Diekspor Secara Ilegal". *Kompas*. 7 Pebruari 2004
- Anoname. 2003. "Volume Ekspor Pupuk Merangkak Naik". *Kompas*. 27 November 2003.
- Anoname. 2003. "Pupuk Urea Mulai Langka Di Jawa Tengah". *Kompas*. 17 Desember 2003
- Boone E. Louis & Kurtz T. David. 1992. *Kontemporary*

- Marketing*. Seventh Edition, The Dryden Pers. Orlando.
- Craven W. David dan Piercy F. Nigel. 2003. *Strategic Marketing*. Seventh Edition. Mc. Graw-Hill Irwin. New York.
- Gaspersz Vincent. 1992. *Tehnik Analisis Dalam Penelitian Percobaan*. Jilid 2. Tarsito. Bandung.
- Kotler, Philip. 1991. *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Diterjemahkan Oleh Adi Zakaria Afiff. Volume dua. Edisi ketujuh. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Koutsoyanis A. 1985. *Modern Microeconomics*. Second edition. English Language Book Society/Macmilan. London.
- Mankiw N. Gregory. 2000. *Teori Makro Ekonomi*. Diterjemahkan oleh Imam Nurmawan. Edisi Keempat. Erlangga. Jakarta.
- Masri Singarimbun. 1995. *Metode Penelitian Survai*. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Sadono Sukirno. 2001. *Pengantar Makro Ekonomi*. Edisi kedua. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samuelson, Paul, William D. Nordhaus. 1989. *Ekonomi*. diterjemahkan oleh Jaka Wasana. Jilid satu. Edisi keduabelas. Erlangga. Jakarta.
- Soediyono. 1989. *Ekonomi Mikro: Harga dan Perilaku Pasar Konsumen*. Edisi ketiga. Liberty. Yogyakarta.
- Suparmoko. 1987. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Edisi Empat. BPFE. Yogyakarta.
- Taylor Bernard W & Russell Roberta. 2000. *Operations Management*. Third Edition. Prentice Hall. New York.

